

Pembina/Penanggunjawab:
Dr. H. Muhammad Hasbi

Pengembang:

Drs. Muhammad Yunus	(Ketua)
Muh. Arman Taufik, S.Pd	(Sekretaris)
Dra. Hj. Ridawati, M.Pd	(Anggota)
Dra. Hj. Nurhaya	(Anggota)
Nurmawati, S.Pd	(Anggota)

Tim Pakar :

Dr. H. Mukhlis Madani
Prof, Dr. Haedar M.

PENGESAHAN

Pada hari, ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas disahkan Model Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan Melalui Pendekatan Budaya *Sibaliparri*.

Akademisi,

Dr. H. Mukhlis Madani

Prof, Dr. Haedar M.

Mengetahui

Kepala BP PAUDNI Reg. III

Dr. H. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

KATA SAMBUTAN

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) Regional III Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu tupoksinya adalah pengembangan dan pengkajian program PAUDNI. Hasil pengembangan dan pengkajian program PAUDNI dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kondisi sosial budaya, letak geografi dan perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh pada ragam kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu diperlukan model-model layanan pendidikan PAUDNI yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Termasuk model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Tahun 2014 BP-PAUDNI telah mengembangkan model/program meliputi program PAUD, Dikmas, Kursus dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Model ini telah dikaji, baik secara teoritik maupun empiris sesuai dengan prosedur ilmiah.

Harapan kami semoga hasil pengembangan program ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program PAUDNI, baik di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat lapangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Kepada semua tim pengembang yang telah berkerja keras sehingga pengembangan model/program ini dapat terwujud, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga hasil kerja Saudara dapat bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu program PAUDNI.

Makassar, Desember 2014

Kepala BP BPPAUDNI Reg. III

Dr. H. Muhammad Hasbi
NIP197306231993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Model Pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan Melalui Pendekatan *Sibaliparri*. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu selama penyusunan naskah dan pelaksanaan pengembangan program.

Model ini salah satu pengembangan program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan oleh BP-PAUDNI Regional III tahun 2014. Maksud pengembangan program pendidikan keaksaraan tersebut untuk mendukung upaya percepatan penuntasan buta aksara pemerintah dengan target pengurangan jumlah tuna aksara tahun 2012 sebesar 4,26 % turun pada tahun 2014 sebesar 3,83%. Penerapan model ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di satuan pendidikan nonformal sehingga angka tuna aksara tersebut bisa berkurang sesuai target.

Naskah model ini memuat substansi program pendidikan keaksaraan dengan pendekatan *sibaiparri* antara lain tentang kerangka pikir model, komponen model dan standar penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk melengkapi model maka disertakan beberapa panduan model. Dengan demikian model ini akan mudah diterapkan oleh pengguna sehingga tujuan model dapat tercapai.

Peran utama dalam penerapan model ini berada di tangan penyelenggara dan pendidik keaksaraan. Penyelenggara pendidikan keaksaraan sebagai penentu jalinan *sibaliparri* dengan pihak pemerintah dan kelompok masyarakat. Sedangkan pendidikan penentu jalinan

sibaliparri dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh sebab itu penyelenggara dan pendidik keaksaraan menjadi target utama dalam sosialisasi model ini pada langkah selanjutnya.

Kami penyusun model ini memohon masukan berupa saran dan ide untuk menambah kapasitas model sehingga lebih mampu menjawab persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Makassar, 17 Desember 2014

Tim Pengembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	7
C. MANFAAT.....	7
D. PENGGUNA	8
BAB II LANDASAN TEORITIK	
A. LANDASAN HUKUM	9
B. LANDASAN KONSEPTUAL	11
C. KERANGKA PIKIR.....	16
BAB III PROTOTYPE MODEL	
A. GAMBARAN MODEL	19
B. KOMPONEN MODEL	28
C. INDIKATOR KEBERHASILAN	41
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	43
B. REKOMENDASI.....	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Model pendekatan budaya *Sibaliparri* pada program pendidikan keaksaraan dikembangkan untuk mendukung percepatan penuntasan tuna aksara di wilayah Sulawesi Barat dengan suku adatnya yaitu Suku Mandar. Pertimbangan pemilihan Sulawesi Barat sebagai wilayah sasaran pengembangan program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya *sibaliparri* yaitu Sulawesi Barat memiliki tingkat tuna aksara di atas rata-rata nasional. Data Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014 menyebutkan tingkat tuna aksara di Sulawesi Barat sebesar 9% sedangkan rata-rata nasional 5%.

Istilah *sibaliparri* berasal dari budaya suku Mandar yang berarti saling membantu mengatasi kesulitan. Adapun sasaran program keaksaraan berfokus pada keaksaraan tingkat dasar yang memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Diharapkan pendekatan *sibaliparri* dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kerja sama yang luas baik dalam penyelenggaraan maupun pembelajaran keaksaraan. Pola gotong royong tersebut tentunya harus tersusun dalam suatu sistem yang utuh sehingga penerapan pendekatan budaya *sibaliparri* dapat mewujudkan semangat *sibaliparri* itu sendiri dalam pendidikan keaksaraan.

Budaya gotong royong atau sibaliparri dalam kehidupan masyarakat sudah sangat dikenal karena menjadi salah satu pola kehidupan sosial yang sudah berlaku secara turun temurun. Budaya gotong royong tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat seperti membangun sarana umum, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Bagi masyarakat adanya budaya gotong royong sangat bermanfaat untuk meringankan beban karena pekerjaan ditanggung secara bersama. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat terdahulu menjadikan budaya gotong royong atau sibaliparri sebagai kekuatan yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan sosial.

Berbagai catatan sejarah yang dapat membuktikan begitu kuatnya gotong royong yang diperlihatkan oleh masyarakat terdahulu. Namun dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, budaya gotong royong atau sibaliparri menghadapi masa yang penuh dengan tantangan. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi memberikan dampak kemudahan dalam berbagai fasilitas kehidupan masyarakat sehingga kurang mempraktikkan pola gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat terdahulu.

Perkembangan teknologi dan perubahan tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat modern, namun harapan agar budaya gotong royong sebagai ciri budaya sosial asli bangsa harus dapat tetap dipertahankan. Agar upaya untuk mempertahankan budaya gotong royong tersebut dapat tercapai maka hendaknya pola budaya gotong royong dapat

terwujud pada seluruh roda kehidupan sosial termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan nonformal pengembangan program pendidikan menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat maka standar isi lebih fokus pada peningkatan kecakapan hidup sehingga penanaman nilai budaya belum optimal.

Terkait dengan budaya gotong royong atau sibaliparri dan pendidikan nonformal terdapat hubungan yang sangat erat. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain itu prinsip penyelenggaraan pendidikan nonformal, mengacu pada konteks dan desain lokal termasuk budaya gotong royong yang berlaku.

Melalui prinsip tersebut dapat ditarik kaitan budaya gotong royong dan pendidikan nonformal yaitu nilai-nilai budaya gotong royong akan dimiliki secara efektif melalui proses pendidikan nonformal, sebaliknya pendidikan nonformal dapat mencapai hasil yang efektif melalui penerapan budaya gotong royong. Hal tersebut dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan satuan program pendidikan nonformal termasuk pada program pendidikan keaksaraan.

Sistem pendidikan nonformal menempatkan pendidikan keaksaraan sebagai salahsatu jenis pendidikan yang berakar dari kehidupan masyarakat. Pendidikan keaksaraan pada dasarnya diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan kemampuan membaca, menulis, berhitung

dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan mendasar bagi tiap individu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah lingkungan masyarakat.

Pendidikan keaksaraan pada praktiknya terdapat dalam lingkungan masyarakat baik yang terkecil seperti lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dalam lingkungan keluarga bentuk pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari upaya membelajarkan anggota keluarga untuk dapat membaca, menulis dan berhitung serta berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Demikian pula dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas pembelajaran keaksaraan semakin penting untuk menjalin interaksi dengan individu atau kelompok dalam masyarakat. Praktik tersebut memberikan kenyataan bahwa terdapat hubungan kuat budaya gotong royong terhadap pendidikan keaksaraan.

Berbagai pengembangan program pendidikan keaksaraan yang menerapkan budaya gotong royong telah dilakukan sesuai dengan pola budaya lokal. Aspek penyelenggaraan program pendidikan yang banyak menjadi fokus antara lain kerjasama pada sumber daya pendidikan keaksaraan seperti tenaga, sarana dan dana. Namun pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada aspek pembelajaran membutuhkan pendekatan budaya gotong royong untuk mencapai tujuan pendidikan keaksaraan secara efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu pola yang dapat menjadi patokan pengembangan program pendidikan keaksaraan.

Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan didalamnya terdapat dua aktivitas yang menjadi bagian pokok yaitu penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan pelaksanaan pembelajaran keaksaraan. Kedua aktifitas tersebut jika dapat dikelola secara baik dan sistematis maka tujuan program pendidikan keaksaraan akan dapat tercapai. Demikian pula jika budaya gotong royong dapat menjadi pola dari kedua aktivitas tersebut, maka program pendidikan keaksaraan akan berproses secara efektif sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Upaya membangun gotong royong atau budaya sibaliparri dalam kedua aktivitas tersebut harus memiliki pola yang strategi untuk menggunakan pendekatan yang mengacu pada budaya masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengikuti penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan. Namun untuk mewujudkan pendekatan budaya dalam penyelenggaraan dan pembelajaran keaksaraan memerlukan mekanisme dan sistem yang utuh atau model agar dapat mencapai tujuan pendidikan keaksaraan.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan keaksaraan di Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional dengan penghargaan *King Sejong Literacy Prize* dan menaikkan posisi Indonesia dari urutan 50 menjadi urutan 38 negara dari 140 negara dari tingkat percepatan penuntasan buta aksara. Prestasi tersebut dapat dilihat dari pengurangan angka tuna aksara dari tahun 2009 sampai 2013 yaitu dari 5,02 % menjadi 3,86 %. (Data Ditbindikmas 2014). Tentunya prestasi tersebut hendaknya menjadi semangat untuk memacu percepatan penuntasan tuna aksara

sehingga Indonesia dapat menaikkan posisi menjadi lebih baik. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang luas dari berbagai unsur karena pendidikan keaksaraan dalam rangka penuntasaan tuna aksara termasuk target dalam pelaksanaan pendidikan untuk semua atau *education for all*.

Dokumen *Education For All dan Millenium Development Gold's* sebagaimana tercantum pada Deklarasi Dakkar 2000 menegaskan :
“*Education for All can only be achieved through broad partnerships between governments, bilateral agencies, civil society groups and the private sector*”.
Dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan masih kurang optimal kerja sama yang melibatkan berbagai unsur untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Model pendekatan budaya sibaliparri bukan hanya terbatas pada dukungan sumber daya pendidikan tetapi diharapkan dapat menjadi gerakan yang lahir dari kesadaran bahwa persoalan tuna aksara menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Upaya tersebut semakin penting dalam menghadapi era persaingan bebas dengan bergulirnya AFTA dan AEC. Masyarakat tuna aksara adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat sehingga perlu uluran bantuan berbagai pihak agar dapat memberikan kemampuan keaksaraan yang kuat sehingga mampu bersaing.

Pendekatan budaya sibaliparri dalam program pendidikan keaksaraan diharapkan dapat mendorong semangat kerja sama karena menerapkan pola budaya yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat.

Model sibaliparri atau pola kerja sama dan gotong royong tersebut, bukan hanya terbatas pada daerah Sulawesi Barat, namun budaya gotong royong berlaku untuk wilayah kerja se regional III bahkan budaya gotong royong atau sibaliparri ini berlaku untuk wilayah Indonesia secara umum dengan istilah yang berbeda atau dengan penyesuaian-penyesuaian.

B. TUJUAN

1. Tujuan umum

Sebagai acuan penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Melalui Pendekatan Budaya *Sibaliparri* yang menerapkan pola kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar guna mendukung upaya percepatan penuntasan buta aksara.

2. Tujuan khusus

Model ini diharapkan dapat :

- a. Menjadi pola sinergitas dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya;
- b. Menjadi pola pelaksanaan pembelajaran keaksaraan melalui pendekatan budaya;

C. MANFAAT

1. Ditjen PAUDNI

Bahan acuan untuk menyusun kebijakan percepatan penuntasan buta aksara melalui pendekatan budaya.

2. Pemerintah Daerah

Bahan acuan untuk menyusun kebijakan daerah dalam percepatan penuntasan buta aksara

3. Lembaga penyelenggara

Panduan untuk menyelenggarakan program percepatan pemberantasan buta aksara melalui pendekatan budaya

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan

Panduan untuk melaksanakan pembelajaran keaksaraan melalui pendekatan budaya

5. Bagi organisasi masyarakat dan atau masyarakat

Bahan acuan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya percepatan penuntasan buta aksara.

D. PENGGUNA

Pengguna Model Program Pendidikan Keaksaraan melalui Pendekatan Budaya *Sibaliparri* terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang PAUDNI

a. UPTD BPKB

b. UPTD SKB

2. Satuan PAUDNI

a. PKBM

b. Kelompok Belajar

c. Majelis Taklim

3. Satuan PAUDNI sejenis lainnya

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. LANDASAN HUKUM

Pengembangan program Pendidikan Keaksaraan melalui Pendekatan Budaya Sibaliparri mengacu pada landasan yuridis baik regulasi nasional maupun internasional. Gerakan pemberantasan buta aksara merupakan gerakan massal yang melibatkan seluruh bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan menjadi tanggung jawab seluruh komponen baik pemerintah, kelompok masyarakat dan atau sektor swasta. Dasar yuridis yang melandasi pengembangan program pendidikan keaksaraan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 : Ayat (5) bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ayat (6) bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 102 ayat (3) bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 19 ayat (1) bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara pada huruf C point 2 butir (a.2) menyebutkan : penguatan kerja sama penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dengan perguruan tinggi, unit pelaksana teknis pendidikan luar sekolah dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta lembaga/organisasi masyarakat lainnya, sehingga menjadi gerakan yang mengakar dalam masyarakat.
 5. Deklarasi Dakar 2000 tentang *Education for All* sasaran ke 5 ; menurunkan angka buta aksara orang dewasa khususnya perempuan sebesar 50 persen pada akhir tahun 2015. Selanjutnya dokumen EFA dan MDGs menyebutkan: pendidikan untuk semua akan berhasil jika terjalin kerja sama yang luas antara pemerintah, lembaga bilateral, kelompok masyarakat dan sektor swasta.
-

Berlandaskan pada regulasi tersebut di atas, maka beberapa pokok pikiran yang mendasari pengembangan Program Pendidikan Keaksaraan Melalui Pendekatan Budaya Sibaliparri yaitu :

1. Percepatan pemberantasan buta aksara menjadi gerakan massal serta menjadi tanggung jawab seluruh komponen baik unsur pemerintah, lembaga bilateral, kelompok masyarakat dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan.
2. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan merupakan satuan program pendidikan nonformal yang memperhatikan prinsip pokok yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Prinsip tersebut dapat bermakna bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

B. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Pendidikan Keaksaraan.

Menguraikan konsep pendidikan keaksaraan dalam upaya penuntasan buta aksara sebaiknya terlebih dahulu mengulas tentang sejarah lahirnya pengembangan program pendidikan keaksaraan. Hal tersebut untuk mengantar pada kesamaan persepsi dan ide terhadap program pendidikan keaksaraan serta upaya pengembangannya.

Program pendidikan keaksaraan di Indonesia bermula dari upaya untuk menuntaskan buta aksara pada awal kemerdekaan tahun 1945. Pada

saat itu jumlah penduduk buta aksara lebih 90%, sehingga pemerintah melakukan upaya pemberantasan buta aksara dengan program kursus ABC. Dari tahun ke tahun pengembangan program pendidikan keaksaraan terus dilakukan hingga akhirnya lahir program pendidikan keaksaraan fungsional. Perkembangan program pendidikan keaksaraan yang cukup lama tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menuntaskan buta aksara yang masih dialami oleh beberapa masyarakat.

Program pendidikan keaksaraan terdiri dua bagian penting yang memiliki arti yang *urgent* terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tuna aksara. Pertama: pendidikan keaksaraan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 112 ayat 1 menyebutkan pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk mengaktualisasikan potensi diri. Penjelasan peraturan pemerintah tersebut memberikan batasan program pembelajaran keaksaraan yang meliputi membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau disingkat *Calistungkasi*. Kedua: keaksaraan fungsional memiliki arti suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Berdasarkan pengertian kedua bagian itu maka program pendidikan keaksaraan bertujuan untuk membantu warga belajar mencari

dan menggunakan bahan calistung sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan keterampilan fungsional yang sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan hidup.

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan memiliki prinsip penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan yaitu :

- a. Konteks lokal, yaitu dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik, agama, budaya, bahasa dan potensi lingkungan.
- b. Desain lokal, yaitu proses pembelajaran yang merupakan tanggapan (respon) minat dan kebutuhan peserta didik dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok.
- c. Proses partisipatif, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dengan memanfaatkan keterampilan keaksaraan yang sudah mereka miliki.
- d. Fungsional hasil belajar, yaitu hasil belajar dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap positif dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup peserta didik.

Berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan keaksaraan tersebut maka pengembangan program pendidikan keaksaraan BP-PAUDNI Regional III tahun 2014 menggunakan budaya *sibaliparri* menjadi pendekatan pembelajaran.

2. Budaya Sibaliparri

Kata “Sibaliparri” berasal dari bahasa Mandar yang merupakan gabungan tiga kata yaitu “si” berarti saling, “bali” berarti membantu, dan “parri” berarti kesulitan. Dalam Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar (Ahmad Asdy:2010) menyebutkan arti *sibaliparri* adalah kebersamaan dalam melakukan semua aktivitas baik berupa suka maupun dengan duka dan juga berarti gotong royong. Idham Khalid Bodi dalam bukunya *Sibaliparri* (2005) mengemukakan makna yang bisa dipahami dari *sibaliparri* sebagai sebuah konsep dan sistem nilai budaya mandar adalah makna kepedulian.

Searah dengan makna *sibaliparri* tersebut, dalam kehidupan sosial masyarakat nilai budaya saling kerjasama sudah menjadi karakter budaya masyarakat. Khusus bagi masyarakat Mandar implementasi budaya kerjasama terdapat pada kegiatan sosial bahkan telah menjadi semangat untuk membangun daerah.

Prinsip dalam budaya *sibaliparri* sukarela untuk membantu meringankan suatu beban pekerjaan atau urusan masyarakat atau individu. Prinsip tersebut searah dengan makna kerjasama yang dikemukakan oleh Johson (1994) yang menjelaskan dalam kegiatan kerjasama atau kooperatif dilakukan secara bersama-sama atau individu berusaha untuk mencari hasil yang menguntungkan seluruh anggota kelompok atau kepentingan bersama.

Melalui pengembangan program pendidikan keaksaraan terdapat potensi untuk menerapkan budaya *sibaliparri* dalam pembelajaran. Konsep *sibaliparri* searah dengan konsep kesetaraan gender dalam kehidupan ekonomi keluarga, maka melalui pendidikan keaksaraan peran ibu rumah tangga dapat terwujud. Mereka dapat memiliki bekal kemampuan keaksaraan dan keterampilan fungsional untuk peluang kerja atau usaha.

3. Pendidikan Keaksaraan melalui Pendekatan Budaya Sibaliparri.

Berdasarkan uraian tentang konsep pendidikan keaksaraan dan konsep budaya *sibaliparri*, maka konsep pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya *sibaliparri* merupakan pola pendekatan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang menerapkan budaya *sibaliparri* atau saling membantu kesulitan. Dua aspek yang menjadi bagian pengembangan pendekatan *sibaliparri* yaitu :

1) Aspek penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan

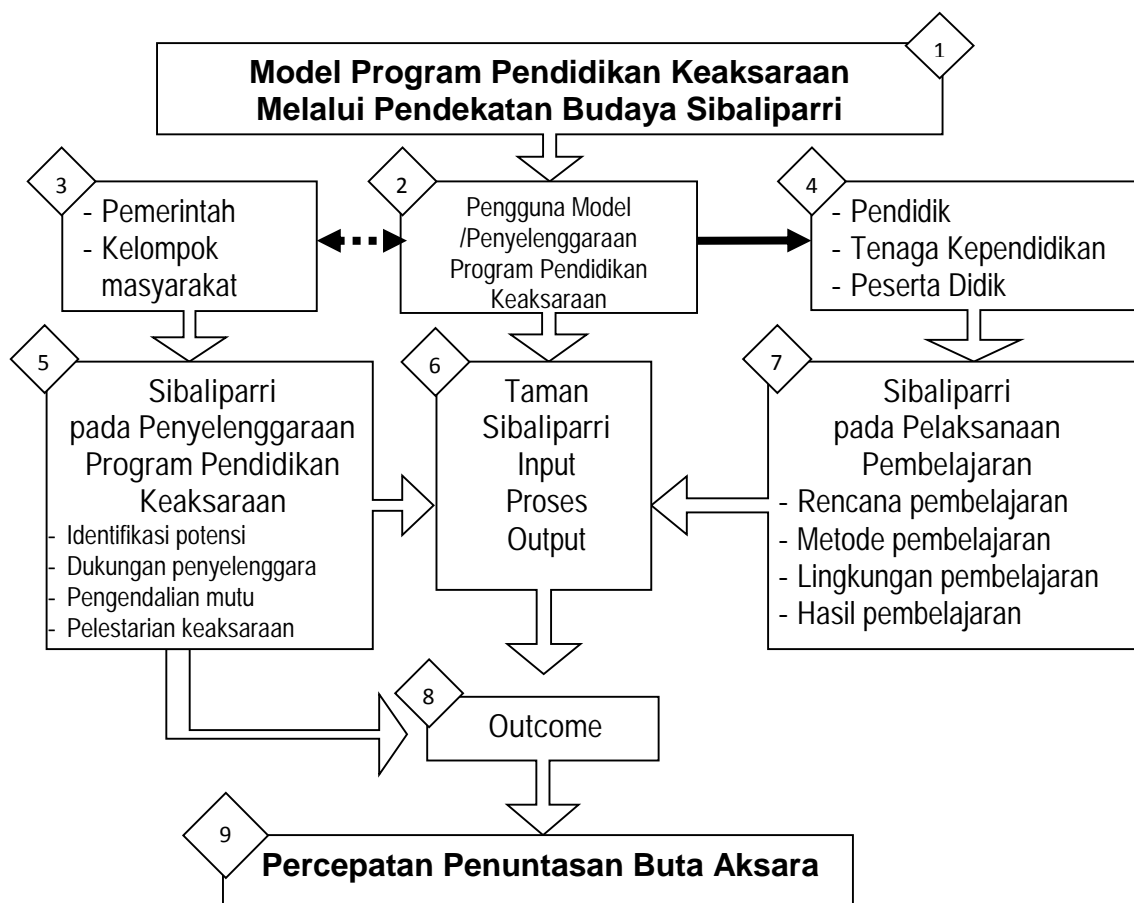
Komponen aspek penyelenggaraan terdiri dari : identifikasi potensi sumber daya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, proses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan pelestarian keaksaraan paska penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

2) Aspek pembelajaran keaksaraan

Komponen aspek pembelajaran terdiri dari : perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

C. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan pada landasan yuridis dan konseptual yang telah terurai maka melalui skema alur kerangka pikir akan menggambarkan pola model program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya *sibaliparri*. Kerangka pikir akan memberikan informasi awal bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan sehingga kelihatan karakteristik yang dimiliki dari model.



Deskripsi :

- 1 Model yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan tingkat dasar oleh penyelenggara program KF dasar sebagai pengguna model.

- 2 Pengguna model/penyelenggara program KF dasar yang terdiri dari UPTD, Satuan PAUDNI, dan Lembaga sejenis lainnya yang menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3 Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai unsur eksternal yang menjadi mitra penyelenggara untuk bekerja sama mendukung penyelenggaraan program keaksaraan.
 - 4 Pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sebagai unsur internal yang saling bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran keaksaraan.
 - 5 Sibaliparri pada aspek penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang meliputi dukungan fasilitas, tenaga, sarana, dan dana. Dukungan tersebut dibawah lingkup kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dukungan fasilitas berupa penggunaan gedung/ruang, Dukungan tenaga berupa melibatkan tutor/pelatih/pendamping. Dukungan sarana berupa pemberian bantuan/pinjaman sarana pembelajaran keaksaraan. Dukungan dana berupa bantuan biaya pembelajaran atau setelah pembelajaran.
 - 6 Taman *Sibaliparri* sebagai tempat untuk mensinergikan seluruh potensi sumber daya dan aktivitas yang mendukung Input, proses, dan output pendidikan keaksaraan yang berorientasi pada mutu hasil.
 - 7 Sibaliparri pada pelaksanaan pembelajaran keaksaraan yang meliputi kerja sama antar pendidik tenaga kependidikan dan antar peserta didik dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran, menggunakan metode
-

pembelajaran keaksaraan, menjamin lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran keaksaraan.

5

Outcome merupakan dampak dari penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan sibaliparri yang nampak pada peningkatan sumber daya manusia lulusan keaksaraan untuk mengaflikasikan diri dalam lingkungan sosialnya.

8

Percepatan penuntasan buta aksara dapat terwujud melalui penerapan model program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya sibaliparri.

Kerangka pikir di atas dapat dilihat terdapat dua aspek dalam penerapan budaya sibaliparri pada penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yaitu aspek penyelenggaraan dan aspek pembelajaran. Pada aspek penyelenggaraan terdapat unsur yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan aspek pembelajaran terdapat unsur yang terlibat yaitu pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

BAB III

GAMBARAN PROGRAM

A. GAMBARAN MODEL

Berdasarkan konsep dan kerangka pikir model program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan *sibaliparri* terdapat dua aspek utama yang menjadi area penerapan *sibaliparri* yaitu aspek penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan aspek pembelajaran keaksaraan.

1. Pola sibaliparri dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan

Penerapan *sibaliparri* dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada pokoknya adalah kerja sama penyelenggaraan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya pendidikan keaksaraan guna mencapai mutu penyelenggaraan yang meliputi mutu input, proses, output dan outcome. Membangun kerja sama tersebut maka peran penting berada di tangan penyelenggara untuk mencari dan menemukan mitra yang dapat mendukung penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Penyelenggara harus memiliki kemampuan dan strategi untuk meyakinkan calon mitra baik pemerintah dan kelompok masyarakat terhadap program kegiatan pendidikan keaksaraan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu penyelenggara hendaknya dipilih dengan melihat aspek kemampuan personal dan sosial sehingga dapat menjalankan peran dan tugas sebagai penyelenggara. Kriteria penyelenggara lebih terurai pada bagian komponen model.

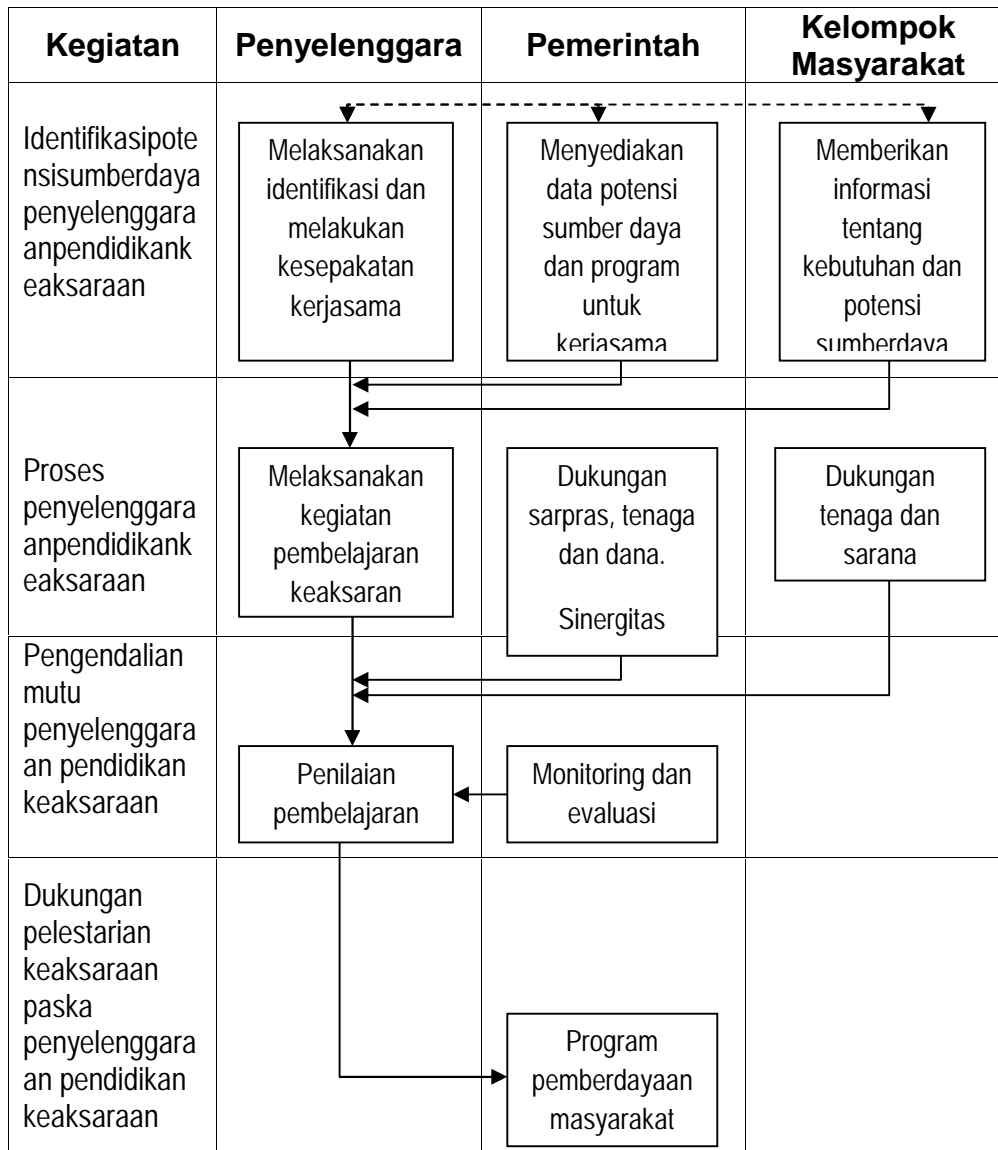
Pendekatan sibaliparri dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dapat dilakukan pada empat kegiatan penyelenggaraan yaitu :

- 1) Identifikasi potensi sumber daya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
- 2) Proses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
- 3) Pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
- 4) Dukungan untuk pelestarian keaksaraan paska penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Kerja sama pada empat kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung mutu hasil tiap tahapan penyelenggaraan dengan mensinergikan sumber daya dan program yang dimiliki oleh masing-masing calon mitra.



Alur sibaliparri pada penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dapat dilihat pada bagan berikut :



Guna kesepakatan kerja sama tersebut dapat terjalin dengan komitmen yang kuat maka kerja sama di tuangkan kedalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan.

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan melalui pendekatan sibaliparri memiliki ciri yang dapat dilihat dengan menguraikan tiap huruf pada kata SIBALIPARRI sebagai berikut:

- S – inergitas : hubungan kerja sama yang kuat antara berbagai unsur baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk saling membantu kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
- I – ntegral : semangat keterpaduan langkah antara seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- B – ijaksana : memahami tugas dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sehingga terjalin saling pemahaman.
- A – ktif : ikut terlibat pada setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sehingga seluruh aspek dapat tertangani.
- L – uwes : fleksibel dalam melihat aspek mana yang harus ditangani serta dapat bekerja sama dengan pihak manapun dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
- I – nisiatif : memiliki dorongan dari diri sendiri untuk memberikan bantuan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.
- P – artisipatif : ikut serta memberikan kemampuan tenaga, pikiran dan materi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
- A – manah : melaksanakan tugas dan peran secara bertanggung jawab dan menanamkan kepercayaan yang tinggi terhadap dukungan yang diberikan akan mampu memberikan
-

pengaruh yang baik dan mutu layanan pendidikan keaksaraan.

R – il : dukungan dan bantuan secara nyata pada aspek mana pada penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang mendapat dukungan.

R – asional : dukungan yang diberikan merupakan hal yang wajar dan logis sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan

I – novatif : mendukung upaya inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan baik pada bidang pengetahuan, teknologi dan informasi.

2. Pola sibaliparri dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan

Aspek pembelajaran keaksaraan menjadi bagian inti dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan karena upaya membekali kemampuan keaksaraan sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembelajaran yang bermutu.



Model *sibaliparri* terdapat ciri pembelajaran keaksaraan yang perlu diperhatikan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik selaku unsur yang ada dalam lingkungan pembelajaran. Ciri tersebut terurai dari tiap suku kata dari kata SIBALIPARRI berikut :

SI : sistematis dan sinergitas

Pembelajaran keaksaraan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran yang utuh. Dimana pembelajaran keaksaraan minimal memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

Pembelajaran keaksaraan dilaksanakan dengan suasana yang bersinergik atau saling mendukung antara pendidik dan peserta didik maupun antar pendidik atau antar peserta didik.

BA : baru dan berimbang

Pembelajaran keaksaraan memberikan informasi pengetahuan dan keterampilan yang baru serta sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pembelajaran keaksaraan menyeimbangkan isi pembelajaran terhadap kebutuhan untuk mencapai sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai aspek utama kompetensi keaksaraan.

LI : literasi

Pembelajaran keaksaraan fokus pada pencapaian kemampuan literasi yang terdiri dari kemampuan membaca, menulis dan menghitung serta berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

PAR : paripurna dan paradigma

Pembelajaran keaksaraan memuat keseluruhan aspek kemampuan keaksaraan yang harus dicapai peserta didik serta melibatkan seluruh sumber daya pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pembelajaran keaksaraan memberikan penyadaran atau mengubah pola pikir peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

RI : ringan dan ringkas

Pembelajaran keaksaraan dilaksanakan dalam suasana yang meringankan pikiran peserta didik dengan membangun kenyamanan dalam pembelajaran.

Pembelajaran keaksaraan menerapkan metode pembelajaran yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih ringkas sehingga akan lebih cepat merasakan perubahan baru dari proses pembelajaran.

Pendekatan sibaliparri dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan dimaksudkan untuk membantu percepatan pencapaian hasil pembelajaran oleh peserta didik. Kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menjadi area penerapan sibaliparri yaitu :

a. Perencanaan pembelajaran

Pada perencanaan pembelajaran terdapat pola sibaliparri dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kesempatan peserta didik serta potensi lokal. Sehingga kerja sama antar pendidik dan antara pendidik dengan peserta didik dilakukan untuk menentukan tema dan isi pembelajaran.

b. Pemanfaatan metode pembelajaran

Pada pemanfaatan metode pembelajaran terdapat pola sibaliparri dimana pendidik bekerja sama dengan peserta didik, atau antar peserta didik untuk bersama-sama melakukan metode yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tiap kompetensi dasar keaksaraan.

c. Menjaga lingkungan pembelajaran

Pada lingkungan pembelajaran terdapat pola sibaliparri untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif, efisien, nyaman dan aman.

d. Pencapaian tujuan pembelajaran

Pola sibaliparri dilakukan dalam bentuk saling membantu antar sesama peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga antar peserta didik terdapat istilah tutor sebaya yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan daya tangkap yang baik membantu pembelajaran keaksaraan peserta didik lainnya yang kurang daya tangkap terhadap materi pembelajaran.

Dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan dengan pendekatan sibaliparri diterapkan budaya *tudang sipulung* atau duduk bersama

berkumpul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sesama peserta didik.

Penerapan model atau pola sibaliparri dalam pelaksanaan pembelajaran maka kunci pengelolaan ada di tangan pendidik yang berperan sebagai fasilitator. Kemampuan yang diutamakan dari seorang pendidik adalah kemampuan menerapkan strategi pembelajaran orang dewasa atau *andragogi*.

Gambaran penerapan sibaliparri pada pelaksanaan pembelajaran dapat terlihat dari skema berikut :

Kegiatan	Pendidik	Peserta Didik
Perencanaan pembelajaran	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Menganalisis kebutuhan belajar serta menyusun rencana pembelajaran</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Antar peserta didik berbagi informasi kebutuhan belajar</div>
Pemanfaatan metode pembelajaran	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">memilih metode pembelajaran</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Antar peserta didik melakukan metode pembelajaran yang diterapkan</div>
Menjaga lingkungan pembelajaran	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Membangun lingkungan pembelajaran</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Antara peserta didik membantu membangun lingkungan pembelajaran</div>
Pencapaian tujuan pembelajaran	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Fasilitasi pembelajaran</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Antara peserta didik membantu pencapaian tujuan pembelajaran</div>

B. KOMPONEN MODEL

Komponen model Program Pendidikan Keaksaraan Melalui Pendekatan Budaya Sibaliparri yaitu :

1. Mitra Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan pendekatan sibaliparri mutlak memiliki mitra sebagai ciri dari model. Adapun unsur mitra dan kriteria mitra kerja sama sebagai berikut :

a. Unsur mitra

- 1) Pemerintah : BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi/UKM, dan pihak terkait
- 2) Kelompok masyarakat : organisasi masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat

b. Kriteria mitra

- 1) Memiliki potensi sumber daya dan sinergitas program kegiatan yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya *sibaliparri*.
- 2) Memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan menerapkan budaya *sibaliparri*.

2. Pendidik

Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan pendekatan *sibaliparri* merupakan unsur penentu pola *sibaliparri* dapat

terjalin dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan. Oleh sebab itu pendidik disyaratkan memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan untuk mentransper pengetahuan dan kemampuan keaksaraan kepada peserta didik.
- b. Memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan pembelajaran.
- c. Memiliki kemampuan untuk memberikan panutan dalam menerapkan budaya *sibaliparri*.
- d. Memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama berbagai unsur dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran.
- e. Memiliki tingkat pendidikan minimal berijazah SMA atau sederajat.

3. Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan yaitu penyelenggara yang memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Peran penyelenggara dalam penerapan model pendidikan keaksaraan melalui pendekatan sibaliparri menjadi pengatur jalinan kerja sama dengan mitra. Oleh sebab itu kriteria tenaga kependidikan atau penyelenggara yang dibutuhkan yaitu :

- a. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
 - b. Memiliki kemampuan personal untuk memberikan panutan sikap sesuai budaya *sibaliparri* dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
 - c. Memiliki kemampuan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan.
 - d. Memiliki kemampuan untuk menyusun perangkat pengelolaan adminitrasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
-

- e. Memiliki tingkat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

4. Peserta didik

Model ini memfokuskan program pendidikan keaksaraan tingkat dasar. Oleh sebab itu kriteria peserta didik sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk tuna aksara yang belum mampu membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
- b. Penduduk tuna aksara berusia 15 tahun ke atas.
- c. Prioritas penduduk tuna aksara yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan.

5. Taman sibaliparri

Komponen taman *sibaliparri* merupakan wadah yang dibentuk sebagai tempat menampung seluruh kerja sama sumber daya pendidikan keaksaraan, program sinergitas, dan pelaksanaan pembelajaran sebagai wujud *sibaliparri*. Kriteria taman *sibaliparri* yaitu :

- a. Memiliki fasilitas ruang yang layak dan memadai untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pertemuan.
 - b. Berada di lingkungan masyarakat
 - c. Memilii sarana meubelir pembelajaran minimal kursi, meja dan lemari.
 - d. Kondusif, bersih, dan aman untuk menjadi lingkungan kegiatan pembelajaran.
-

- e. Milik perorangan atau lembaga dilengkapi legalitas kepemilikan serta diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran.

6. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan

Komponen penyelenggaraan pendidikan keaksaraan merupakan kesatuan sistem penyelenggaraan dengan pendekatan sibaliparri untuk mewujudkan percepatan penuntasan buta aksara. Untuk melihat sistem penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dalam model ini maka terurai berdasarkan standar pendidikan nasional yang memuat delapan aspek yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana, standar biaya dan standar penilaian. Adapun pengembangan delapan standar pendidikan nasional pada penyelenggaraan pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya *sibaliparri* adalah sebagai berikut :

a. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan disusun untuk pendidikan keaksaraan tingkat dasar. Acuan yang digunakan adalah standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut :

Dimensi	Standar Kompetensi Lulusan
Sikap	Memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan alam dalam kehidupan sehari-hari
Pengetahuan	Menguasai pengetahuan faktual tentang cara

	berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat
Keterampilan	Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat

b. Standar isi

Standar isi pada pendidikan keaksaraan merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi patokan untuk menetapkan materi pokok keaksaraan dasar sebagai berikut :

Kompetensi Inti		Kompetensi Dasar	
1	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat berperilaku dan memiliki etika sebagai warga masyarakat yang baik	1.1	Mampu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
		1.2	Mampu menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dan taat pada aturan yang disepakati
		1.3	Mampu menunjukkan sikap jujur dalam berkomunikasi dan berhitung pada kehidupan sehari-hari
2	Menguasai pengetahuan faktual tentang cara	2.1	Menguasai teknik membaca
		2.2	Mengenal teks personal tentang identitas diri

	mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dalam Bahasa Indonesia, serta berhitung untuk menyelesaikan masalah sehari-hari	2.3	Mengenal teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) minimal dalam 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
		2.4	Mengenal teks informasi sederhana dalam bentuk poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
		2.5	Mengenal teks narasi pendek minimal 3 (tiga) kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
		2.6	Mengenal teks petunjuk/arahan minimal 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan
		2.7	Mengenal bilangan (1-1000), uang, dan operasinya dalam kehidupan sehari-hari
		2.8	Mengenal dan membaca satuan panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari
3	Mampu membaca, menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung aktivitas di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan	3.1	Membaca suku kata dan kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
		3.2	Membaca lancar teks minimal 3 (tiga) kalimat sederhana dan memahami isinya

sehari-hari	3.3	Menulis kata dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari	
	3.4	Menulis teks personal tentang identitas diri	
	3.5	Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 (tiga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari	
	3.6	Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia	
	3.7	Menulis teks narasi minimal 3 (tiga) kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri	
	3.8	Menulis teks petunjuk/arahan tentang kehidupan sehari-hari minimal 3 (tiga) kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar	
	3.9	Melakukan dan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan sampai dua angka dalam kehidupan sehari-hari	
	3.10	Memperkirakan atau membulatkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari	

		3.11	Mengukur dan menggunakan satuan ukuran panjang, jarak, berat, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan hasil pengukuran
--	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Standar proses

Standar proses pendidikan keaksaraan melalui pendekatan sibaliparri terdiri dari rencana pembelajaran dan kalender pendidikan keaksaraan.

1) Rencana pembelajaran

Rencana pembelajaran merupakan struktur materi pokok yang mengacu pada kompetensi dasar (KD) serta pengalokasian jam pelajaran tiap materi pokok.

Kode KD	Materi Pokok	Alokasi waktu
2.1 3.1	Teknik membaca kata dan kalimat dengan memuat tema lokal melalui pendekatan <i>sibaliparri</i>	20 JP
3.2 3.3	Membaca kalimat sederhana minimal 3 kalimat memuat tema lokal melalui pendekatan <i>sibaliparri</i>	20 JP
2.2 3.4	Mengenal dan menulis personal (KTP, formulir sederhana) melalui pendekatan <i>sibaliparri</i> .	5 JP
2.3 3.5	Mengenal dan menulis teks deskripsi dengan mempelajari struktur teks dan ciri-ciri bahasa yang dimiliki dengan memuat tema lokal melalui pendekatan <i>sibaliparri</i>	5 JP
2.4 3.6	Mengenal dan menulis teks informasi dengan memuat tema lokal melalui pendekatan <i>sibaliparri</i>	10 JP
2.5 3.7	Teks narasi/cerita dengan memuat tema lokal melalui pendekatan <i>sibaliparri</i>	10 JP

2.6 3.8	Teks petunjuk prosedur dengan mempelajarii struktur dan ciri bahasa yang dimiliki dengan memuat tema lokal melalui pendekatan sibaliparri	10 JP
2.7 3.9 3.10	Bilangan asli, bilangan cacah, penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian dengan memuat tema lokal melalui pendekatan sibaliparri	24 JP
2.8 3.11	Alat ukur panjang, alat ukur waktu, alat ukur berat, serta satuan panjang, satuan waktu, satuan berat dengan memuat tema lokal melalui pendekatan sibaliparri	16 JP
Total Jam Pelajaran		120 JP

2) Kalender pendidikan

Model program pendidikan keaksaraan dengan pendekatan *sibaliparri* menggunakan 120 jam pelajaran yang dapat dicapai dalam kurun waktu 3 bulan. Perhitungan pembagian jam pelajaran sebagai berikut :

1 hari (1 kali pertemuan) = 2 jam pelajaran

1 pekan (5 hari kegiatan) = 10 jam pelajaran

Jumlah pekan untuk 120 jam pelajaran = 12 pekan atau 3 bulan

Namun dalam pelaksanaan sering ditemukan kendala yang mengurangi hari pembelajaran. Sehingga jumlah bulan efektif selama 3 bulan merupakan waktu yang normal untuk mencapai kemampuan keaksaraan tingkat dasar.

Berdasarkan pada perhitungan waktu pembelajaran tersebut maka kalender pendidikan disusun sebagai berikut :

Bulan	Kegiatan	Pekan	Alokasi Hari
Ke 1	Pembelajaran KD 2.1 dan 3.1	I - II	10 hari
	Pembelajaran KD 3.2 dan 3.3	III - IV	10 hari
Ke 2	Evaluasi proses	I	1 hari
	Pembelajaran KD 2.2 dan 3.4	I	2 hari
	Pembelajaran KD 2.3 dan 3.5	I	2 hari
	Pembelajaran KD 2.4 dan 3.6	II	5 hari
	Pembelajaran KD 2.5 dan 3.7	III	5 hari
	Pembelajaran KD 2.6 dan 3.8	IV	5 hari
Ke 3	Evaluasi proses	I	1 hari
	Pembelajaran KD 2.7, 3.9, dan 3.10	I - III	12 hari
	Pembelajaran KD 2.8 dan 3.11	III-IV	8 hari
	Evaluasi akhir	IV	1 hari

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

1) Kualifikasi dan jumlah pendidik

No	Aspek	Standar
1	Kualifikasi	- Berijazah minimal tingkat SMA atausederajat
2	Jumlah	- Jumlah pendidik pada program keaksaraan minimal 1 orang untuk 10 orang pesertadidik dengan tugas pokok melaksanakan pendekatan sibaliparri dalam pembelajaran

2) Kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan

No	Aspek	Standar
1	Kualifikasi	- Berijazah minimal tingkat SMA atausederajat
2	Jumlah	- Jumlah tenaga kependidikan pada program keaksaraan sebanyak 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dengan tugas pokok melaksanakan pendekatan sibaliparri dalam penyelenggaraan

e. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan keaksaraan dengan pendekatan *sibaliparri* terdiri dari :

No	Aspek	Standar
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga penyelenggara berbentuk UPTD bidang PAUDNI, Satuan PAUDNI dan Satuan PAUDNI sejenis. - Legalitas lembaga penyelenggara sesuai ketentuan. - Alamat domisili lembaga penyelenggara jelas.
2	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki unsure tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. - Ada struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
3	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki program kerjasama dengan pemerintah dan kelompok masyarakat - Mengembangkan kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan sesuai dengan kontek

		lokal.
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pedoman pelaksanaan - Menjalankan kemitraan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat - Melaksanakan pembelajaran keaksaraan
5	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pedoman evaluasi - Mengevaluasi hasil pembelajaran tiap peserta didik

f. Standar sarana

Standar sarana memuat kriteria sarana yang mendukung penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan.

No	Aspek	Standar
1	Jenis	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki bahan ajar cetak - Memiliki meubelir pembelajaran minimal papan tulis, kursi dan meja
2	Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bahan ajar cetak mencukupi - Jumlah meubelir minimal papan tulis 1 dan kursi meja belajar sesuai jumlah peserta didik untuk tiap rombongan belajar.

g. Standar biaya

Standar pembiayaan pendidikan keaksaraan sibaliparri merupakan kriteria minimal biaya pendidikan untuk memberikan kemampuan keaksaraan dan kecakapan hidup per orang peserta didik. Mengacu pada

standar kompetensi lulusan keaksaraana maka biaya pendidikan keaksaraana sibaliparri distandarkan sebesar Rp. 350.000 perorang.

Standar pembiayaan pendidikan keaksaraana sibaliparri per orang terinci untuk kebutuhan pembiayaan berikut :

a) Biaya manajemen

Biaya manajemen merupakan kriteria pembiayaan yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan kegiatan adminitrasi, dan kegiatan ketenagaan pengelolaan. Besar biaya manajemen dari total biaya penyelenggaraan ditetapkan sebesar 10%.

b) Biaya pembelajaran

Biaya pembelajaran merupakan kriteria pembiayaan yang terkait dengan kegiatan sarana belajar, dan kegiatan ketenagaan pendidik/tutor. Besar biaya pembelajaran dari total biaya penyelenggaraan ditetapkan sebesar 70%.

c) Biaya paska pembelajaran

Biaya paska pembelajaran merupakan kriteria pembiayaan yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan uji keaksaraana dan pemberian Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Besar biaya pendampingan paska pembelajaran sebesar 30%.

h. Standar penilaian

No	Aspek	Kriteria
1	Program penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi/penilaian awal - Evaluasi/penilaian proses - Evaluasi/penilaian akhir

2	Hasil penilaian	- Ada laporan penilaian - Memiliki SUKMA
---	-----------------	---------------------------------------------

C. INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL

Penerapan model pendidikan keaksaraan melalui pendekatan sibaliparri sebagaimana telah diuraikan terdapat pada dua aspek yaitu sibaliparri dalam penyelenggaraan program dan sibaliparri dalam pelaksanaan pembelajaran keaksaraan. Oleh sebab itu indikator keberhasilan model dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan memiliki jalinan kerja sama dengan pemerintah yang berupa dukungan sumber daya penyelenggaraan dan sinergitas program pemberdayaan masyarakat sasaran keaksaraan.
2. Program pendidikan keaksaraan juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat melalui bantuan sumber daya berupa tenaga, dan sarana.
3. Semangat saling membantu dan kerja sama membudaya dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan baik hubungan dengan pihak eksternal maupun hubungan dengan pihak internal.
4. Penguasaan kemampuan keaksaraan lebih kuat karena ada dukungan dari pemerintah atau kelompok masyarakat terhadap pelestarian keaksaraan.

5. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan memiliki perangkat pembelajaran keaksaraan yang lengkap dan relevan dengan budaya *sibaliparri* yang tertanam dalam kehidupan masyarakat.

BAB IVs PENUTUP

A. KESIMPULAN

Model program pendidikan keaksaraan melalui pendekatan budaya sibaliparri merupakan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan yang dapat mewujudkan percepatan penuntasan buta aksara. Pokok pikiran dalam model ini adalah meletakkan budaya saling membantu atau kerja sama sebagai strategi dalam penyelenggaraan program dan pembelajaran pendidikan keaksaraan dengan melibatkan unsur eksternal seperti pemerintah dan kelompok masyarakat serta unsur internal yaitu antara sesama peserta didik atau dengan pendidik.

Melalui model sibaliparri dengan melibatkan berbagai pihak memberikan kekuatan tambahan untuk meningkatkan mutu layanan dan hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Menghadapi era globalisasi tahun 2015 sebagai awal terbukanya pasar bebas asia, maka sangat penting untuk saling mempererat kerja sama termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Model ini memberikan semangat untuk menumbuhkan sinergitas antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan guna menuntaskan persoalan buta aksara yang masih tinggi. Dampak yang diharapkan yaitu luaran pendidikan keaksaraan akan memiliki kemampuan keaksaraan yang dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri.

B. REKOMENDASI

Agar model ini dapat memberikan dukungan terhadap percepatan penuntasan buta aksara, maka perlu sosialisasi model yang lebih luas agar satuan PAUDNI selaku calon pengguna dapat memahami lebih dalam tentang ide pokok model dan mampu menerapkan model ini sesuai dengan langkah-langkah dan strategi *sibaliparri*.

Model sibaliparri atau pola kerja sama dan gotong royong ini sangat fleksibel penggunaannya bukan hanya terbatas pada daerah Sulawesi Barat, namun model ini dapat digunakan untuk wilayah kerja se regional III bahkan budaya gotong royong atau sibaliparri ini berlaku untuk wilayah Indonesia secara umum sehingga model ini dapat digunakan dengan istilah yang berbeda atau dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Informasi selengkapnya dapat menghubungi BPPAUDNI Regional III Pokja Dikmas.

**Jl. Adyaksa No. 2 Makassar Tlp. (0411) 440065. Fax : (0411) 421460
E-mail: support@bpplsp-reg5.go.id website : www.bpplsp-reg5.go.id**

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fanani, *Kamus Istilah Pofuler*, 2009, Jogjakarta. Mitra Pelajar
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. *NSPK Pendidikan Keaksaraan dasar*, 2014. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Eko B Harsono dkk, *Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depatemen Pendidikan Nasional.
- H. Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, 2010, Mamuju. Yayasan Mahaputra
- Ibrahim, Muslimin A, *Pembelajaran Kooperatif*. 2000, Surabaya: UNESA University Press.
- Kusnadi *et al.* , *Pendidikan Keaksraan Filosofi, Strategi, Implementasi*, 2005, Jakarta : Ditjen PLS.
- Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparri*, 2005, Makassar. Graha Media Celebes
- Ridawati Dkk, *Model Pembelajaran pendidikan keaksaraan Balibolae*, 2009, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional V Makassar.
- Ridawati Dkk, *Model Pembelajaran pendidikan Keaksaraan Kewirausahaan Kooperatif (K-3)*, 2011, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional V Makassar.
- Sihombing U,. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*, 2000, Jakarta.
- Sujana D, *Manajemen Program Pendidikan Nonformal*,2005, Bandung: Falah Rproduction
-